

**RANCANG BANGUN MODEL PENGENDALIAN
DANA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DENGAN PENDEKATAN *SOFT SYSTEM METHODOLOGY*
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Agus Purnomo, Yeli Erika

ABSTRACT

Public problems are problems that concern the interests of many people which are very crucial to be handled by the government, so that they require serious and alternative handling to solve these public problems. One of the public problems that require serious handling is the problem of education. Every child has the right to education and teaching in the context of personal development and the level of intelligence according to their interests and talents. Early childhood education has an important meaning for the future of children in helping to apply good knowledge and discipline in early childhood, as well as assisting the development of children's character through the process of understanding children's character and social skills with their surroundings. To support the operational activities of education, the government provides Operational Assistance for the Implementation of Early Childhood Education which functions to improve quality education services.

Based on the formulation of the problem above, the aim of this study is "Design of Education Operational Fund Control Model for Early Childhood Education with Soft System Methodology Approach in the Education Office of South Lampung Regency". The conclusions obtained from this study are (1) The process of controlling at the South Lampung Regency Education Office starts from requests for assistance to reporting the use of through a long, convoluted and ineffective process. (2) There are still some institutional operators who are not yet skilled in dapodic data processing, proposal preparation and accountability reporting, thus delaying the submission process to reporting the use of funds. (3) Lack of facilities and infrastructure in most institutions, such as computers and internet connections, which affect the delivery of Dapodic Data to the Ministry of Education is slow. (4) The slow completion of the is because all institutions must be present in the process of signing to the Education Office and the delay in the verification process by officials at the Education Office which is deemed ineffective. (5) With the model development process it is expected that the control at the South Lampung District Education Office will be 4 weeks, while the 6 (six) stages (real condition) system has a length of service time of up to 7 weeks, so that the onrol process becomes faster and more effective

Based on the formulation of the problem above, the aim of this study is "Designing a Model of Operational Fund Control for Early Childhood Education with Soft System Methodology Approach in the Education Office of South Lampung Regency". The conclusions obtained from this study are (1) The control process at the South Lampung District Education Office, starting from requests for assistance to reporting on its use, is a long, convoluted and ineffective process. (2) There are still some institutional operators who are not yet skilled in dapodic data processing, proposal making and accountability reporting, thus slowing down the submission process to reporting the use of funds. (3) Lack of facilities and infrastructure in most institutions, such as computers and internet connections, which affect the delivery of Dapodic Data to the Ministry of Education is slow. (4) The slow completion of cooperation is due to the fact that all institutions must be present in the process of signing the collaboration to the Education Office and the delay in the verification process by officials at the Education Office who are deemed ineffective. (5) With the model development process, it is expected that the control at the South Lampung Regency Education Office will be 4 weeks, while the 6 (six) stage (real condition) system takes 7 weeks of service time, so that the control process becomes faster and more effective.

Keywords: Control, Education Office, Soft Systems Methodology

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Pendidikan anak di usia dini memiliki arti yang penting bagi masa depan anak dalam membantu menerapkan ilmu dan disiplin yang baik pada anak usia dini, serta membantu pembangunan karakter anak melalui proses pemahaman karakter dan kemampuan bersosialisasi anak dengan sekitarnya

Adanya penjaminan hak dari negara bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan belum sepenuhnya dapat terwujud. Faktor ekonomi menjadi salah satu kendala tersendiri bagi sebagian masyarakat, terutama bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh haknya dalam bidang pendidikan. Hal tersebut menjadikan masyarakat tidak lagi memprioritaskan pendidikan sebagai prioritas utama, akan tetapi lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang lebih mendesak.

Di Kabupaten Lampung Selatan terdapat 579 lembaga pendidikan anak usia dini terdiri dari 195 TK, 372 KB, 3 TPA, 9 SPS dengan jumlah siswa mencapai 23.365 siswa yang tersebar diberbagai kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. Dari 581 lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Lampung Selatan terdapat 2 lembaga PAUD yang di kelola Pemerintah Daerah dan selebihnya dikelola oleh masyarakat. Untuk membantu operasional kegiatan pendidikan, pemerintah memberikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP- Paud) yang didasarkan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2018 Tentang Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Paud.

Berdasarkan pengamatan penulis penyampaian proposal oleh pihak penyelenggara Paud ke Dinas Pendidikan sering direvisi hal ini disebabkan karena data peserta didik yang salah ketik, data alamat lembaga pendidikan yang tidak lengkap, nama pengelola dan rekening penyelenggara yang salah. Penyusunan anggaran dalam proposal juga belum memperhatikan komponen rekening dan kegiatan yang telah ditetapkan, dimana kegiatan pembelajaran adalah 50% dari anggaran BOP-Paud, kegiatan pendukung 35%, dan kegiatan lainnya 15%, tetapi kenyataannya pembelian kertas, krayon, spidol, penyediaan makanan sehat dimasukkan dalam kegiatan pendukung yang seharusnya adalah kegiatan pembelajaran.

Permasalahan selanjutnya adalah terkait *Cut Off* penarikan data Dapodik pada masing-masing sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan belum optimal, kurangnya ketelitian operator sekolah dan kurangnya jumlah operator dinas sehingga belum mampu mengakomodir untuk menyampaikan data peserta didik secara online dan tepat waktu. Penyampaian data dapodik mulai dari bulan Desember sampai dengan awal Januari, namun dalam kenyataannya pihak penyelenggara sering terlambat dalam input data peserta didik sehingga akan mempengaruhi waktu dan jumlah dana bantuan operasional pendidikan yang diterima oleh lembaga tersebut.

Selain kondisi kurangnya jumlah aparatur, konektivitas internet yang buruk untuk melakukan entri data Dapodik oleh operator sekolah juga berpengaruh pada pemutakhiran data Dapodik siswa ke operator Dinas Pendidikan sehingga berdampak terhadap rekapitulasi data yang langsung terkoneksi dengan Kementerian Pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan administrasi dana bantuan operasional pendidikan yang baik oleh pihak penyelenggara lembaga pendidikan Paud maupun oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018, yaitu penggunaan dana yang mengacu kepada empat hal, yaitu efisien, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dilihat dari NSPK Norma, Standar, Prosedur, dan kriteria Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Sosial Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paud. Hal ini dilakukan agar dana bantuan operasional penyelenggaraan Paud dapat digunakan tepat pada sasarannya dan sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut.

Untuk itu diperlukan suatu sistem pengendalian kegiatan pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan Paud sehingga semua tahapan kegiatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Penulis perlu membuat suatu sistem pengendalian kegiatan pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan Paud dengan pendekatan *Soft System*. Karena metode *Soft System* merupakan proses standar atau metodologi yang digunakan untuk mengembangkan dan memberikan gambaran serta petunjuk yang jelas mengenai tahap-tahap yang harus dilakukan untuk menganalisis sistem pengendalian dana bantuan operasional pendidikan Paud.

Dari latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Rancang Bangun Model Pengendalian Dana Bantuan Operasional Pendidikan PAUD dengan pendekatan Soft System Methodology pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan pada penelitian ini adalah : Mengetahui, Menganalisis dan Menjelaskan Rancang Bangun Model Pengendalian Dana Bantuan Operasional Pendidikan PAUD dengan pendekatan Soft System Methodology pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan

B. Tinjauan Pustaka

1. Pendekatan Sistem

Pendekatan system adalah dasar rekayasa system. Hal ini sangat penting untuk *System, System Thinking, Systems Methodology, Sitem Design* dan *Systems Engineering*. Pendekatan system adalah paradigma pemecahan masalah. Artinya, pendekatan system menganggap bahwa atribut keseluruhan system digunakan untuk mencapai tujuan suatu system, yaitu untuk memecahkan masalah. (Jackson, et al 2006 dalam Barusman, 2017:35).

Pendekatan system diperlukan apabila kita menghadapi suatu masalah yang kompleks sehingga dan diperlukan analisa terhadap permasalahan, untuk memahami hubungan bagian dengan bagian lain dalam masalah tersebut, serta kaitan antara masalah dengan masalah lain. dengan kata

lain masalah tersebut memiliki karakteristik : (1) kompleks, (2) dinamis, (3) probabilistic. Sehingga dapat dirancang suatu solusi yang (1) sibernetik artinya berorientasi tujuan (2) holistic yaitu cara pandang yang utuh terhadap kebutuhan system (3) efektif, sehingga dapat dioperasionalkan. (Eriyanto, 2006 dalam Barusman, 2017:42)

2. Cara Berpikir Sistem (*Systems Thinking*)

Systems thinking lebih cenderung mengajak untuk berpikir secara sintesis dan holistic. *Systems thinking* juga merupakan pandangan suatu system dan untuk pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah.

3. *Soft Systems Methodology (SSM)*

Menurut Checland dan Poulter (2006) (dalam Barusman, 2017:72) terdapat 7 Tahapan dalam *Soft Systems Methodology*, atau disebut juga *SSM Classic*, yaitu :

- a. Mengidentifikasi permasalahan atau situasi yang tidak berstruktur, yaitu menyatakan suatu problem yang membutuhkan analisis problem dan situasi, dengan membiarkan anggapan-anggapan yang beredar tanpa membatasi dan langsung menyimpulkan.
- b. Meneliti situasi atau keadaan dan menyusun pernyataan permasalahan, dilakukan menggunakan analisis unsur-unsurnya. Hal ini dilakukan untuk menangkap struktur problem, proses yang terlibat dan keterhubungan antara struktur dan proses.
- c. Memilih prespektif dan definisikan sistem yang relevan, dilakukan dengan menyatakan *root definition*, yaitu melakukan identifikasi elemens situasi dan pihak yang terlibat dengan menggunakan CATWOE.
- d. Mengembangkan model konseptual sistem sesuai dengan definisi, yang dibangun dengan mendeskripsikan aktivitas-aktivitas yang harus ada untuk menjalankan *tasks* yang dinyatakan dalam *root definition*
- e. Membandingkan model dengan dunia nyata, yaitu membandingkan konsep konseptual dengan kenyataan. Dimana model konseptual dianggap sebagai bentuk ideal yang memberikan inspirasi, bukan sebagai kritik atau ancaman.
- f. Mendefinisikan perubahan yang akan diimplementasikan secara sistematis, yaitu mendefinisikan dan menyeleksi pilihan-pilihan untuk mencapai kondisi ideal. Jika diperlukan untuk mengubah sistem yang berjalan, maka perlu diidentifikasi perubahan yang dapat dilakukan.
- g. Mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi problem, yaitu mendesain program tindakan dimana *outcome* dari tahap ini berupa persetujuan mengenai tindakan yang akan dilakukan. tahap ini mencakup implementasi dari perubahan yang diharapkan dan juga perubahan yang memang selayaknya dilakukan.

C. METODOLOGI

Pada penelitian ini digunakan *Method Soft System* dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan tujuan melakukan eksplorasi dan pemahaman sistemik tentang manajemen pengelolaan BOP PAUD di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. Eksplorasi bertujuan menggali masalah-masalah dan solusi sistemiknya yang terkait dengan kebijakan pengelolaan BOP PAUD. Teknik pengumpulan data sebagaimana dipaparkan diatas, dikombinasikan dengan tahapan *Soft System Methodology*. Dalam SSM terdapat tujuh tahapan. Dalam Penelitian ini yang dibahas tahap ke -1 sampai ke -6, sedangkan tahap ke-7 yaitu upaya perbaikan atas masalah secara metodologis harus merupakan upaya bersama antara peneliti dengan partisipan. Namun dalam tulisan ini langkah ke-7 merupakan upaya “intuitif” peneliti semata-mata. Langkah ke-7 tersebut adalah gagasan “skenario” implementasi model manajemen informasi dalam mewujudkan pengelolaan BOP PAUD yang efektif dan efisien.

Untuk merumuskan permasalahan, digunakan teknik yang dirumuskan Chekland dalam akronim CATWOE (*Customers, Actors, Transformation process, World View, Owners, Environmental Constraints*). *Customers* adalah pihak-pihak yang akan diuntungkan atau dirugikan dari kegiatan pemecahan masalah. *Actors* adalah Pihak-pihak yang melaksanakan aktivitas pemecahan masalah. *Trasformation process* adalah aktivitas yang mengubah masukan menjadi keluaran. *World view* adalah pemahaman berbagai pihak tentang makna yang mendalam atas situasi permasalahan. *Owners* adalah pihak yang dapat menghentikan aktivitas organisasi. *Environmental Constrains* adalah hambatan dalam lingkungan yang tidak bisa dihindari.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data primer yaitu melalui wawancara dengan narasumber yang didapat kesimpulan awal bahwa pengendalian BOP-PAUD dikarenakan oleh faktor-faktor yang ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengendalian BOP-PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

| No. | Permasalahan |
|-----|--|
| 1 | Koneksitifitas internet yang buruk |
| 2 | Lokasi daerah yang tidak bisa terjangkau koneksi internet |
| 3 | SDM operator Lembaga yang kurang menguasai penggunaan aplikasi penginputan data dapodik sehingga memperlambat proses pengajuan |
| 4 | Sikap acuh Lembaga ketika diberikan informasi batas waktu penarikan data dapodik akan tetapi lembaga memproses informasinya secara lambat |
| 5 | Proposal pengajuan dana BOP-PAUD yang menumpuk sehingga memerlukan waktu yang panjang dalam memverifikasi kelengkapannya |
| 6 | Ketika memverifikasi proposal, lampiran pendukung yang dibutuhkan tidak jelas/buram tidak di scant sehingga proposal akan dipulangkan kembali ke lembaga, proses perbaikan (waktu) menjadi hambatan dalam pencairan dana |
| 7 | Masih ada lembaga dalam penyusunan RKAS tidak menggunakan juknis Permendikbud No 2 Tahun 2018 sebagai acuan |

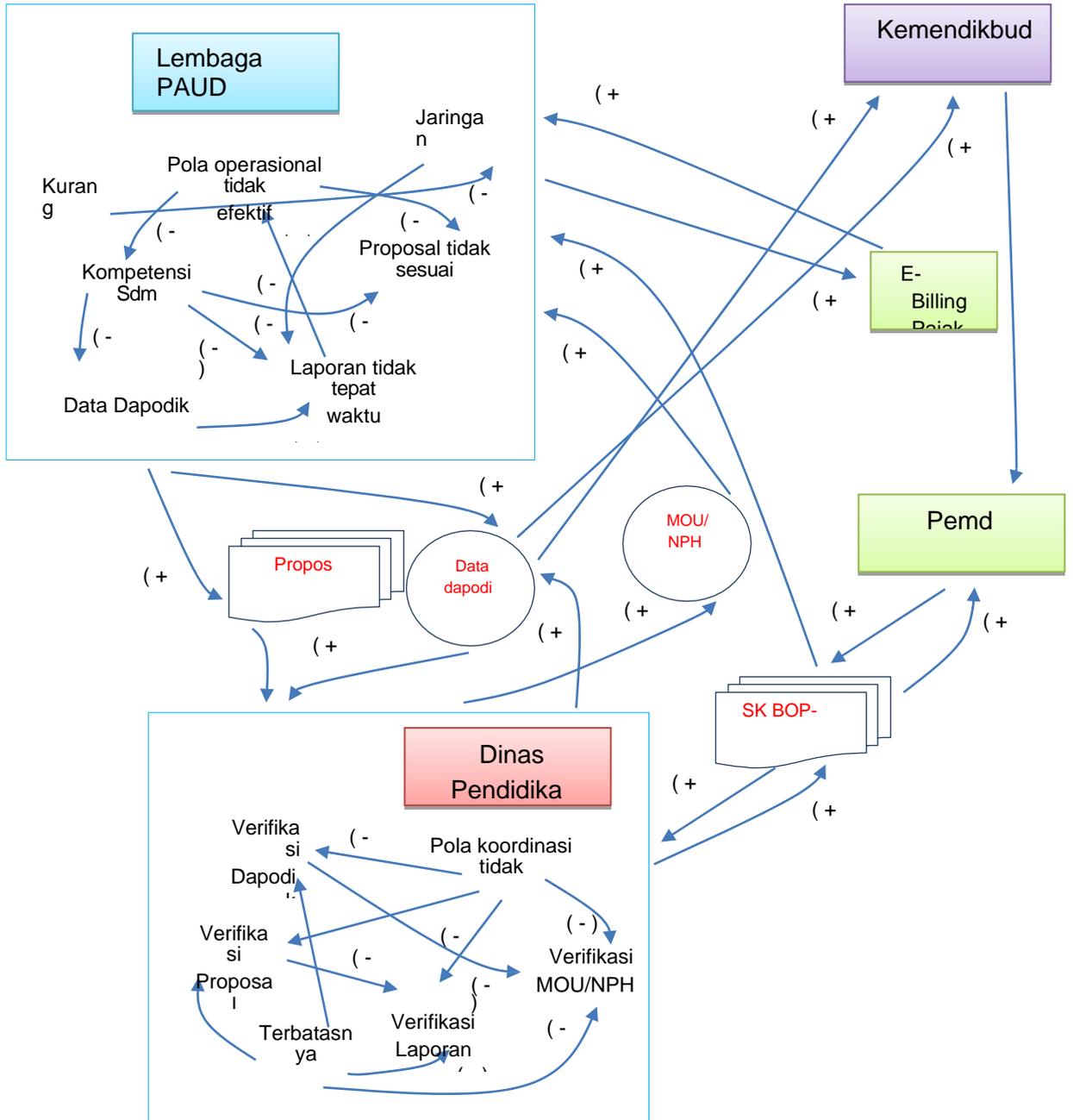
| | |
|----|--|
| 8 | Berkas NPHD/MOU yang menumpuk dan di verifikasi memerlukan waktu yang lebih lama karena pengerjaan verifikasi harus di paraf oleh Kabid di sela-sela rutinitas kegiatan kerja harian. |
| 9 | Tidak adanya Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur retribusi pajak daerah tentang potongan pajak pada pelaksanaan kegiatan Lembaga PAUD yang menggunakan anggaran dana BOP, dan pemotongan pajak daerah tersebut tidak tertuang dalam Permendikbud No 2 tahun 2018, yang mengakibatkan kerancuan lembaga PAUD dalam mempertanggung jawabkan dana tersebut dan hal tersebut berpengaruh pada keterlambatan proses pengajuan bantuan dana BOP pada tahun berikutnya. |
| 10 | Alur/proses pengajuan BOP yang kompleks sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan belum menggunakan aplikasi online dalam proses pengajuannya |
| 11 | Belum adanya sosialisasi yang lebih intensif untuk menuntun lembaga dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOP |
| 12 | Belum adanya sosialisasi terkait E-billing, untuk memudahkan lembaga dalam membayar pajak. |

Sumber : Hasil Wawancara, 2019

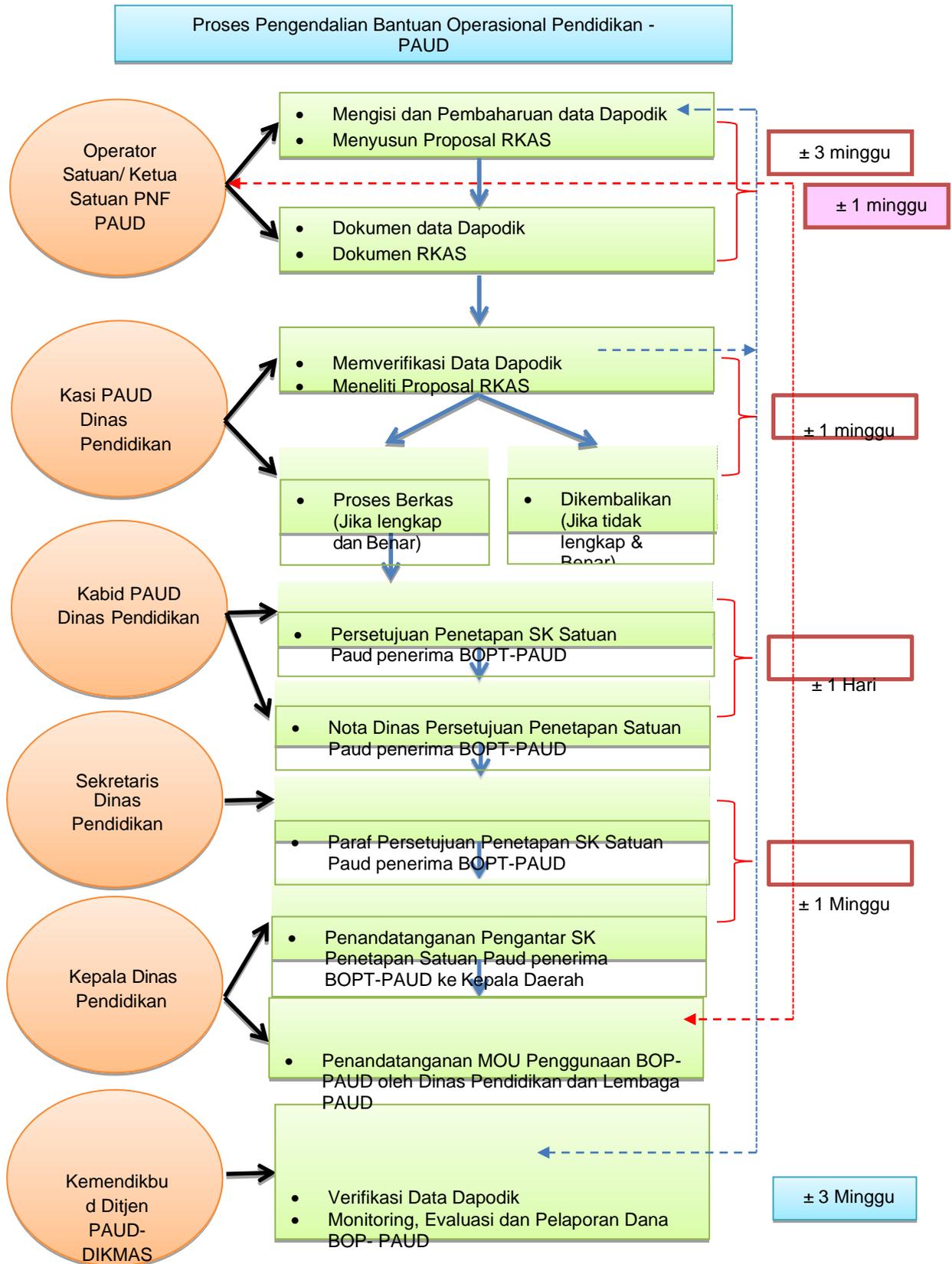
Dari pemaparan diatas maka masalah sudah dapat ditemukan dan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian BOP-PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, untuk lebih jelas akan digambarkan rumusan dan identifikasi masalah dengan menggunakan alat analisa *Causal Loop Diagram* pada gambar 2.

Karena prosesnya yang melibatkan berbagai unsur yang terkait dengan kewenangan dan peraturan yang berbeda, prosesnya sering kali tidak mudah, baik bagi lembaga penerima BOP-PAUD maupun bagi instansi yang terlibat. Sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat permasalahan, baik yang bersifat tidak perlu terjadi (*mis/unctroled*) maupun yang masih dapat dikendalikan (*difficult/ controled*). Untuk lebih jelasnya, dapat digambarkan melalui *rich pictures* (gambaran proses) model riil BOP-PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana namapak pada gambar 3.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan melalui pengendalian bantuan dana pendidikan yang dikelola dengan baik, maka dilakukan berbagai upaya dengan mengedepankan kecepatan dan ketepatan pelayanan. Maka faktor- faktor lingkungan baik faktor internal maupun eksternal mempengaruhi hasil kinerja organisasi. Dalam hasil penguraian faktor-faktor tersebut membantu dalam menganalisa upaya- upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan pengendalian BOP-PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan (Tabel 2.)



Gambar 2. Causal Loop Diagram

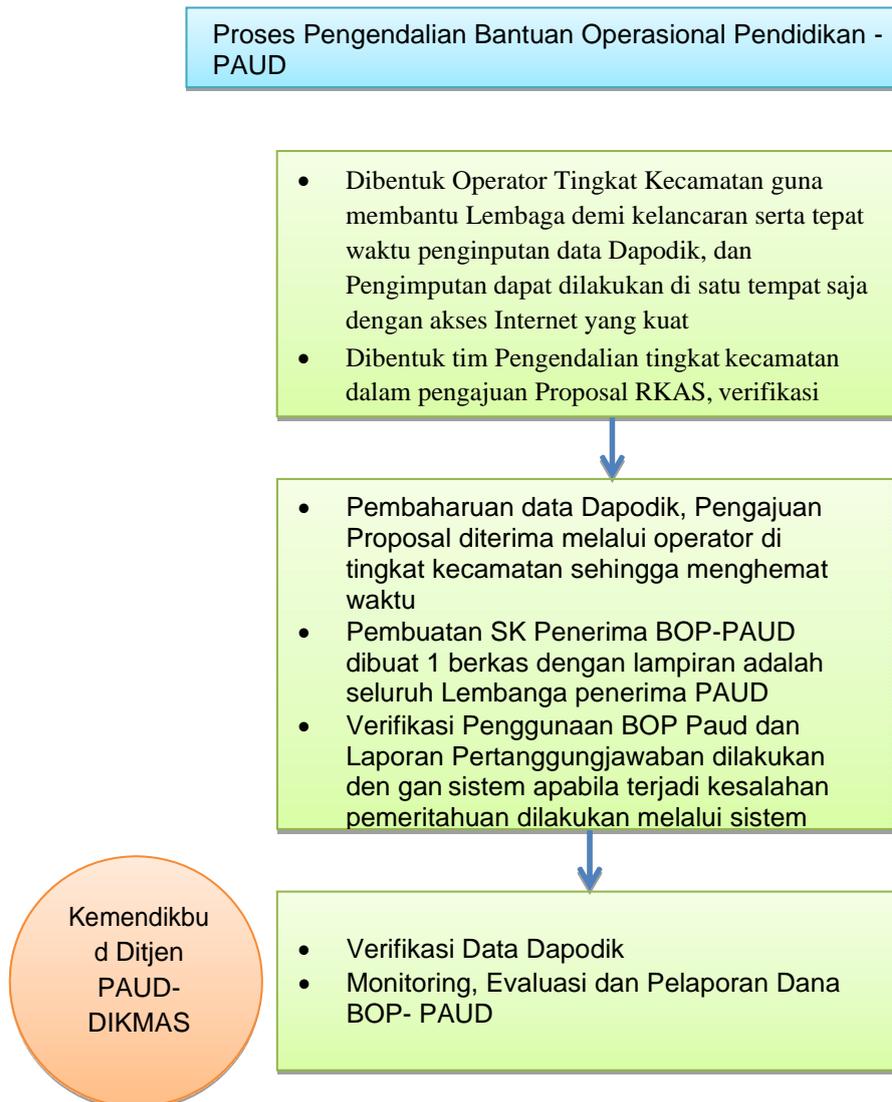


Gambar 3. Proses Riil Pengelolaan BOP-PAUD

Tabel 2. Sistem aktivitas (*Purposeful Activity systems*) yang relevan dengan Situasi Masalah (*Root Definitions*)

| Elemen CATWOE | Deskripsi |
|----------------------|---|
| Customer | Lembaga PAUD/TK |
| Actor | Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Mitra Kerja Terkait |
| Transformation | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya Kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Daerah yang memberikan kemudahan dan dukungan dalam perkembangan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Lampung Selatan - Penyederhanaan Prosedur dalam proses pengajuan hingga pelaporan BOP PAUD - Perbaikan Sarana Konektifitas Internet Yang Memadai. - Sistem administrasi komputerisasi dan terkoneksi dengan berbasis sitem Online siring kemajuan jaman untuk mempercepat layanan. - Peningkatkan kemampuan petugas layanan melalui pelatihan secara terprogram - Agar Dana BOP PAUD dapat terserap dan tepat sasaran |
| World View | - Prosedur Pengendalian Dana Bop PAUD yang memerlukan waktu, proses serta beberapa aturan yang akan menghambat pelayanan dan menjadikan proses terkesan ribet sedangkan tingginya tuntutan masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini masih terbatas oleh sarana dan prasarana pendukung dan pelayanan yang di butuhkan adalah pelayanan yang cepat tepat. |
| Owner | Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (BUPATI) |
| Environment | Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan |

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dalam uraian di atas untuk gambaran proses pengembangan modelnya (gambar 4). Untuk mengetahui kegunaan dari perbaikan Pengendalian BOP-PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan perlu dilakukan perbandingan antara model kelembagaan dengan model kenyataan yang terjadi agar dapat diketahui bagian mana yang perlu dilakukan perbaikan dalam sistem model kelembagaan (Tabel 3.)



Gambar 4. Model Konseptual berdasarkan “*root Definitions*”

Tabel 3 : Perbandingan Antara Model Kelembagaan dengan Realita (Kenyataan di Lapangan)

| Masalah | Model Kelembagaan | Model Realita |
|---|---|---|
| Terlambatnya Input Data Dapodik | Jadwal input data Dapodik telah di tetapkan oleh Operator Pusat dan dilakukan serentak serta disegerakan agar ketika proses <i>cut off</i> semua data telah terinput dan terkoneksi dengan baik ke pusat. | Konektifitas internet yang buruk, tidak semua lokasi lembaga Paud terjangkau akses internet, sikap acuh lembaga lembaga, serta SDM Pengelola dan operator yang tidak cakap dalam penggunaan aplikasi. |
| Proposal pengajuan BOP-PAUD oleh lembaga sebagian besar belum berdasarkan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018 | Permedikbud No.2 Tahun2018 Sebagai petunjuk Teknis Pengajuan Proposal | Pengajuan proposal belum sesuai dengan Juknis Permendikbud No. 2 tahun 2018.Pengembalian Proposal untuk perbaikan membuat proses pengajuan menjadi terhambat dan memerlukan waktu yang relatif lama. |
| Lambatnya Proses Penyelesaian MOU/ NPHD | Lembaga bersama-sama Dinas Pendidikan menandatangani MOU/NPHD sebagai salah satu syarat untuk penyaluran BOP-PAUD | Verifikasi MOU/NPHD hanya dilakukan oleh Kabid PAUD dan DIKMAS |
| Keterlambatan Pelaporan Penggunaan BOP-PAUD | Lembaga Mengirimkan Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan | Pelaporan manual memerlukan verifikasi yang cukup lama, ketidakpahaman lembaga dalam pelaporan pajak online |

(Sumber: Penelitian 2019)

Melakukan perubahan yang diinginkan dan Layak secara Sistematis antara lain:

Perlunya Dibentuk Operator Tingkat Kecamatan guna membantu Lembaga demi kelancaran serta tepat waktu pengimputan data Dapodik, dan Pengimputan dapat dilakukan di satu tempat saja dengan akses Internet yang kuat :

1. Perlu dibentuk Tim Pengendalian dalam pengajuan Proposal guna menghemat waktu, biaya dan jarak serta memudahkan dalam menjadwalkan sosialisasi pedoman Junis BOP secara guna memberikan pemahaman bagi lembaga dalam pengajuan hingga pelaporan dana BOP-PAUD.
2. Perlu dibentuk tim gabungan di tingkat Kecamatan yang didelegasikan dengan SK Kepala Dinas untuk mendampingi lembaga dalam memenuhi kelengkapan berkas dan verifikasi MOU/NPHD tanpa harus datang seluruh lembaga ke Dinas Pendidikan sehingga menghemat waktu dan biaya serta dibentuk tim verifikasi MOU/NPHD di Dinas Pendidikan yang didelegasikan dengan SK Kepala Dinas yang bertanggung jawab terhadap koreksi berkas dan kelengkapan MOU/NPHD hingga siap untuk ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan.
3. Mengoptimalkan tim yang dibentuk di kecamatan dalam pengendalian pelaporan BOP-PAUD,

serta perlu adanya kerjasama dengan pihak Perpajakan bersama-sama dengan Dinas Pendidikan memberikan sosialisasi teknis penggunaan pelaporan pajak secara online

4. Pada tabel tiga perbandingan model konseptual (ideal) dengan kenyataan di lapangan untuk mengetahui gap yang terjadi guna memberi rekomendasi perbaikan. Sedangkan untuk melakukan tindakan perubahan yang diinginkan berdasarkan serapan informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan para nasumber dapat diperhatikan tindakan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4 : Tindakan Perubahan Untuk Menjembatani Gap Antara Model Kelembagaan Dengan *Realita*(Kenyataan di Lapangan)

| Masalah | Model Kelembagaan | Model Realita | Tindakan Perubahan |
|---|---|---|--|
| Terlambatnya Input Data Dapodik | Jadwal input data Dapodik telah di tetapkan oleh Operator Pusat dan dilakukan serentak serta disegerakan agar ketika proses <i>cut off</i> semua data telah terinput dan terkoneksi dengan baik ke pusat. | Konektifitas internet yang buruk, tidak semua lokasi lembaga Paud terjangkau akses internet, sikap acuh lembaga lembaga, serta SDM Pengelola dan operator yang tidak cakap dalam penggunaan aplikasi. | Dibentuk Operator Tingkat Kecamatan guna membantu Lembaga demi kelancaran serta tepat waktu pengimputan data Dapodik, dan Pengimputan dapat dilakukan di satu tempat saja dengan akses Internet yang kuat. |
| Proposal pengajuan BOP-PAUD oleh lembaga sebagian besar belum berdasarkan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018 | Permedikbud No.2 Tahun2018 Sebagai petunjuk Teknis Pengajuan Proposal | Pengajuan proposal belum sesuai dengan Juknis Permendikbud No. 2 tahun2018.Pengembalian Proposal untuk perbaikan membuat proses pengajuan menjadi terhambat dan memerlukan waktu yang relatif lama.membuat proses pengajuan menjadi terhambat dan memerlukan waktu yang relatif lama. | Dibentuk Tim Pengendalian dalam pengajuan Proposal guna menghemat waktu, biaya dan jarak serta memudahkan dalam menjadwalkan sosialisasi pedoman Junis BOP secara guna memberikan pemahaman bagi lembaga dalam pengajuan hingga pelaporan dana BOP-PAUD. |
| Lambatnya Proses Penyelesaian MOU/ NPHD | Lembaga bersama-sama Dinas Pendidikan menandatangani MOU/NPHD sebagai salah satu syarat untuk penyaluran BOP-PAUD | Verifikasi MOU/NPHD hanya dilakukan oleh Kabid PAUD dan DIKMAS | Dibentuk tim gabungan di tingkat Kecamatan yang dilegalkan dengan SK Kepala Dinas untuk mendampingi lembaga dalam memenuhi kelengkapan berkas dan verifikasi MOU/NPHD tanpa harus datang seluruh lembaga ke Dinas Pendidikan sehingga menghemat waktu dan biaya, serta dibentuk tim verifikasi MOU/NPHD di Dinas Pendidikan yang dilegalkan dengan SK Kepala Dinas yang bertanggung jawab terhadap koreksi berkas dan kelengkapan MOU/NPHD hingga siap untuk ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan. |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Keterlambatan Pelaporan Penggunaan BOP-PAUD | Lembaga Mengirimkan Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan | Pelaporan manual memerlukan verifikasi yang cukup lama, serta ketidakpahaman lembaga dalam pelaporan pajak online | Mengoptimalkan tim yang dibentuk di kecamatan dalam pengendalian pelaporan BOP-PAUD, serta perlu adanya kerjasama dengan pihak Perpajakan bersama- sama dengan Dinas Pendidikan memberikan sosialisasi teknis penggunaan pelaporan pajak secara online |
|---|--|---|--|

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian dan pembahasan mengenai model pengendalian BOP-PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dengan pendekatan *soft system methode*, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan kondisi riil yang terjadi dalam proses pengendalian BOP-PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan mulai dari permohonan pengajuan bantuan hingga pelaporan penggunaan BOP-PAUD melalui proses yang panjang, berbelit-belit dan tidak efektif.
2. Masih ada sebagian tenaga operator lembaga yang belum terampil dalam pengolahan data dapodik, pembuatan proposal serta pelaporan pertanggung jawaban BOP-PAUD sehingga memperlambat proses pengajuan hingga pelaporan penggunaan dana BOP-PAUD.
3. Kurangnya sarana dan prasarana di sebagian besar Lembaga PAUD seperti komputer dan koneksi internet yang berpengaruh terhadap penyampaian Data Dapodik ke Kementerian Pendidikan menjadi lambat.
4. Lambatnya penyelesaian MOU/NPHD yang disebabkan karena semua lembaga harus hadir dalam proses pendandatanganan MOU/NPHD ke Dinas Pendidikan dan lambatnya proses verifikasi oleh pejabat di Dinas Pendidikan yang dianggap tidak efektif.
5. Dengan proses pengembangan model diharapkan pengendalian BOP-PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan menjadi 4 minggu, sedangkan sistem 6 (enam) tahapan (*real condition*) lamanya waktu pelayanan mencapai 7 minggu, sehingga proses pengendalian BOP-PAUD menjadi lebih cepat dan lebih efektif.

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut dikemukakan peneliti beberapa saran terkait dengan model pengendalian BOP-PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dengan pendekatan *soft system methodology*, sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan hendaknya melakukan ujicoba model rancang bangun proses pengendalian BOP-PAUD melalui 3 tahapan berdasarkan model konseptual yang dianggap menjadi solusi untuk mempercepat pelayanan pengajuan sampai dengan pelaporan penggunaan BOP-PAUD.
2. Diperlukan peningkatan kemampuan petugas operator Lembaga PAUD dalam pengolahan data dapodik, pembuatan proposal hingga pelaporan pertanggung jawaban BOP-PAUD melalui

pelatihan maupun bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan yang dilaksanakan secara terprogram.

3. Diperlukan peran Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan untuk menjadi fasilitator dalam pengusulan sarana dan prasarana pendukung ke Kementerian Pendidikan yang dipergunakan untuk mempermudah proses pengajuan hingga pelaporan BOP-PAUD oleh Lembaga PAUD.
4. Perlu dibentuk tim gabungan di tingkat Kecamatan yang dilegalkan dengan SK Kepala Dinas untuk mendampingi lembaga dalam memenuhi kelengkapan berkas dan verifikasi MOU/NPHD tanpa harus datang seluruh Lembaga PAUD ke Dinas Pendidikan sehingga menghemat waktu dan biaya, serta dibentuk tim verifikasi MOU/NPHD di Dinas Pendidikan yang dilegalkan dengan SK Kepala Dinas yang bertanggung jawab terhadap koreksi berkas dan kelengkapan MOU/NPHD hingga siap untuk ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan.
5. Diperlukan pendampingan/ advokasi terhadap pelaksanaan ujicoba model rancang bangun proses pengendalian BOP-PAUD oleh semua pihak yang terlibat sehingga model konseptual yang ditawarkan benar-benar menjadi solusi untuk mempercepat pelayanan pengajuan sampai dengan pelaporan penggunaan BOP-PAUD.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus P., Erwan dan Dyah Ratih S. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Gava. Media: Yogyakarta.
- Barusman, M. Yusuf. S. 2017. Soft Systems Methodology. Solusi Untuk Kompleksitas manajemen. UBL Press. Bandar Lampung.
- Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi, Media Presindo. Yogyakarta
- Haines and A. Petit. 2010. "Conditions for Successful Human Resource Information Systems," Hum. Resour. Manag.
- Hardjosoekarto Sudarsono. 2003. Strategi Pelayanan Prima, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
- Islamy, Irfan. 2003. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bina Aksara. Jakarta
- Nugroho, Riant. 2014. Public Policy. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Non Fisik BOP PAUD
- Senge, Peter et. al. 2003. The Fifth Discipline Fieldbook. Interaksa. Batam Sugiyono, 2012. Statistika untuk Penelitian, Alfabeta. Bandung
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
- Wahab, Solichin Abdul . 2012. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta
- Wibawa, Samodra. 2011. Politik Perumusan Kebijakan. Graha Ilmu. Yogyakarta